

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adnan, H. Indra Muchlis, 2019, *Negara Hukum dan Demokrasi Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, Yogyakarta : Trussmedia Grafika.

Asshiddiqie, Jimly 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Konstitusi Press.

-----, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

-----, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press: Jakarta.

Kaloh, J., 2010, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika

Labolo, Muhadam dan Teguh, Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Maria Farida Indrati S, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius

Prasetyo, Teguh, 2018, *Filsafat Pemilu*, Bandung: Nusa Media.

Safa'at, Muchamad Ali dkk, 2010, *Hukum Acara Konstitusi*, Jakarta : Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm 127-128

Salossa, Daniel S., 2005, *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, Yogyakarta : Media Pressindo.

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sharyanto, 2015, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (dinamika pengaturan status hukum kewarganegaraan dalam Perspektif perundang-undangan)*, Yogyakarta: Absolute Media.

Siahaan, Maruarar, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri., 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

Sumbu, Telly, dkk, 2010, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara

Surbakti, Ramlan, 2011, *Meningkatnya Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran*, Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana.

Wiradarme, 2019, *Konfigurasi Politik Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Sistem Demokrasi di Indonesia*, Mataram : Pustaka Bangsa.

2. Jurnal

Achmad Taufik dk, “Hak Mantan Narapidana untuk ikut serta dalam pemilihan umum di Indonesia”, *Jurnal Yustitia Vol. 21 No. 1 Mei 2020*

Hadipurwoko dkk, “Jaminan Hak Pilih Bagi Narapidana Pada Pemilu 2019 Di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru”, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2020*

Mohammad Mahrus Ali dkk, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013*.

Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, “Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan” *Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020*.

Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, “Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan”, *Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020*

Siti Zikrina Farahdiba dkk, “Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945”, *Jurnal Kewarganegaraan Volume 5 Nomor 2 Desember 2021*.

Donal Fariz, Pembatasan Hak bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020*.

Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 4, 2013.

Sumber internet: <https://www.gresnews.com/berita/hukum/70103-7-dari-10-gubernur-di-sumatera-tersebut-korupsi/>, di akses pada tanggal 7 Desember Tahun 2023.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.